

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021 ini dengan baik.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 memuat pertanggungjawaban kinerja Tahun 2021. Di dalamnya termuat Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin. Termuat juga Rencana Kinerja, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Sosial serta capaian kinerja yang tercermin dalam Realisasi fisik dan keuangan selama Tahun 2021.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dinas Sosial dan pihak lainnya yang telah terlibat dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2021. Laporan yang kami buat ini memang masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang membangun amat diharapkan untuk kesempurnaannya di waktu mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Rantau, Februari 2022

Kepala Dinas Sosial,



Drs. H. SAMSI, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640120 199203 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dalam masa aktifnya telah menetapkan Rencana Strategis Perubahan untuk periode 2018-2023. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis periode 2018-2023 yang telah disusun dalam masa aktif Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang merujuk pada bidang Sosial adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan : - Menurunnya Kemiskinan
- ❖ Sasaran : - Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan
 - Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- ❖ Indikator sasaran : - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri
 - Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kepala Dinas Sosial,

Drs. H. SAMSI, MM
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19640120 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. DAFTAR ISI	i
2. DAFTAR TABEL.....	iii
3. LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Struktur Organisasi ,Tugas Pokok,dan Fungsi Sosial Kabupaten Tapin.....	4
1. Struktur Organisasi	4
2. Tugas Pokok.....	14
3. Fungsi.....	14
C. Tantangan dan Peluang	15
1. Tantangan.....	15
2. Peluang	15
D. Landasan Hukum	16
E. Sistematika.....	16
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Dinsos Tahun 2021	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Perencanaan Strategis	18
1. Visi Kepala Daerah	20
2. Misi Kepala Daerah	20
3. Tujuan dan Sasaran	21
3.1 Tujuan.....	21

3.2 Sasaran	21
B. Indikator Utama Kegiatan.....	22
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Analisis Atas Pencapaian Kinerja	39
1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin.....	39
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	41
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	42
4. Capaian Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran	48
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	57
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	58
E. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Standar Nasional	59
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	61
G. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	69
H. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	71
I. Akuntabilitas Keuangan	71
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021	13
Tabel 1.2	Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021	14
Tabel 1.3	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DINSOS Tahun 2021.....	17
Tabel 3.1	Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2021	40
Tabel 3.2	Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021	41
Tabel 3.3	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.5	Data Jumlah PPKS yang Mandiri Tahun 2021.....	44
Tabel 3.6	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	47
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	47
Tabel 3.8	Data Jumlah PPKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS Tahun 2021	46
Tabel 3.9	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021	72
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2021	72

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
(SIMDA)

LAMPIRAN 2 : PK Perubahan 2021

LAMPIRAN 3 : Rencana Aksi Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

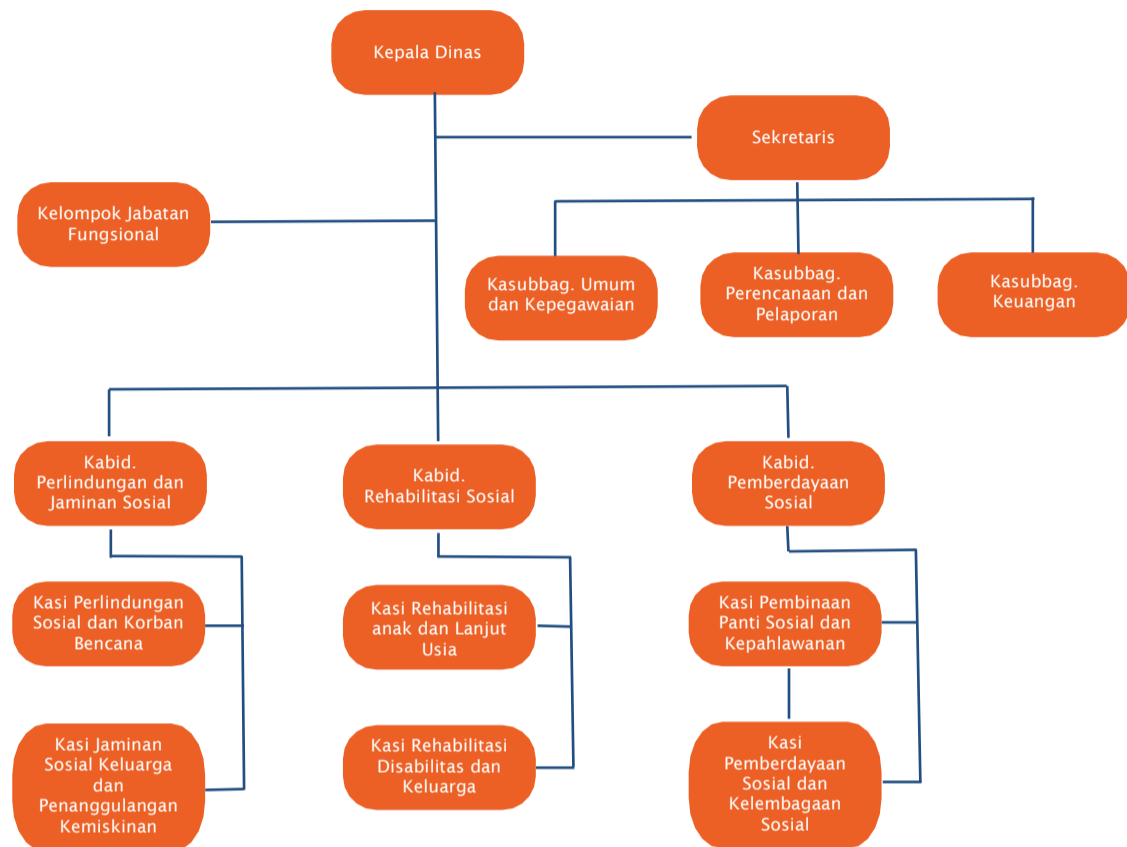
LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No 34 tahun 2018 :



1. Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari:

- Sekretaris, Memiliki Uraian Tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional, Prosedur lingkup Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Memiliki Uraian Tugas:
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - g) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h) menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
 - j) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - k) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - l) menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - m) melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
 - n) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;

- o) melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - p) menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 - q) mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas;
 - r) memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkup Dinas; dan
 - s) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Sub. Bagian Program dan Pelaporan, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Dinas yang terintegrasi;
 - d) menyiapkan bahan dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e) menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
 - f) menyiapkan bahan dan menyusun Sistem Informasi Dinas;
 - g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
 - h) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Sub. Bagian Keuangan, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - e) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
 - f) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
 - i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
2. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Memiliki Uraian Tugas :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan sosial dan korban bencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Kasi Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial dan korban bencana;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan sosial dan korban bencana;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan sosial dan korban bencana;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
 - h) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan sosial dan korban bencana;
 - k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan sosial dan korban bencana; dan
 - l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Kasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - g) menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
 - h) menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kapasitas dan pendampingan fakir miskin;
 - i) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, Memiliki Uraian Tugas :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia, rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adittf (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - c) mengumpulkan, mengolalr, menganalisis dan menyajikan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adittf (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - g) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial alak terlantar;
 - h) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;

- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial anak lanjut usia;
 - k) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - l) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - m) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia;
 - o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia; dan
 - p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Kasi Rehabilitasi Disabilitas dan Keluarga, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
 - h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja rehabilitasi disabilitas dan keluarga; dan
 - i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial, Memiliki Uraian Tugas :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pembinaan panti sosial, kepahlawanan, pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 - Kasi Pembinaan Panti Sosial dan Kepahlawanan, Memiliki Uraian Tugas :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan panti sosial dan kepahlawanan;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan panti sosial dan kepahlawanan;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan panti sosial dan kepahlawanan;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - e) menyiapkan bahan dan mengelola Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - g) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan sosial organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial anak/panti asuhan/panti jompo, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan dunia usaha;
 - h) menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap akses jaminan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, kelembagaan dunia usaha, nilai-nilai kepahlawanan/taman makam pahlawan, sumbangan sosial dan undian berhadiah;
 - i) menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian terhadap akses jaminan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, kelembagaan dunia usaha,

- nilai-nilai kepahlawanan/taman makam pahlawan, sumbangan sosial dan undian berhadiah;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, kelembagaan dunia usaha, nilai-nilai kepahlawanan/taman makam pahlawan, sumbangan sosial dan undian berhadiah;
 - k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pelaksanaan terhadap panti sosial/yayasan dan organisasi kesejahteraan sosial;
 - l) menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian terhadap panti sosial /yayasan dan organisasi kesejahteraan sosial;
 - m) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengembangan bagi panti sosial, yayasan/organisasi kesejahteraan sosial;
 - n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan panti sosial dan kepahlawanan;
 - o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan panti sosial dan kepahlawanan; dan
 - p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Kasi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial, Memiliki Uraian Tugas :
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - g) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
 - h) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - i) menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai tenaga kesejahteraan sosial masyarakat karang taruna;

- j) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian terhadap tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna serta bimbingan lanjut bagi usaha ekonomi produktif;
- l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengembangan bagi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan karang taruna;
- m) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial;
- n) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tapin di dukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 20 orang sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 20 orang terdiri dari :

- Pejabat Struktural = 8 orang
- Staf / Pelaksana = 6 orang
- Jabatan Fungsional = 6 orang
- Jumlah = 20 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV/C	1
2.	IV/A	1
3.	III/D	8
4.	III/C	2
5.	III/B	2
6.	III/A	3
7.	II/D	1
8.	II/B	1
9.	I/B	1

Sedangkan Tingkat Pendidikan Formal sebagian besar Sarjana dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Formal															
		SD		SLTP		SLTA		D. III		D.IV		S.I		S.2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat Struktural					1		1				1	2	2	1	5	3
2	Staf Pelaksana	1		1		1						1	2			4	2
3	Jabatan Fungsional					1						3	2			4	2
J U M L A H		1		1		3		1				6	6	2	1	13	7
T o t a l		PNS DINAS SOSIAL														20 orang	

Berdasarkan gambar komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 3 orang, Pegawai yang berpendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 12 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda/D3 ada sebanyak 1 orang. Pendidikan SLTA/SMK sebanyak 3 orang, SLTP 1 orang dan SD 1 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Namun demikian, jumlah pegawai pada Dinas Sosial masih banyak kekurangan terutama pada staf.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Tapin ialah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

3. Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Tapin mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penangan fakir miskin;
- 4) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- 5) pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- 6) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di daerah;
- 7) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah;

- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- 9) pengelolaan kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

Bidang Sosial :

1. Penanganan masalah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui kegiatan :
 - Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - Bantuan sosial pangan bagi PMKS
 - Bantuan sosial tunai dan sembako bagi masyarakat terdampak covid-19
2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin.
 - Pembinaan anak terlantar, pendampingan kepada anak berhadapan dengan hukum dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia
3. Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pembinaan, Penanganan, dan Pengawasan Asistensi bagi penyandang melalui kegiatan pendampingan sosial, bantuan sosial berupa uang dan sembako.

Keseluruhan bidang tugas tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang Sosial kepada PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

C. TANTANGAN DAN PELUANG

1. Tantangan

- a) Belum optimalnya pelayanan publik.
- b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani masalah kesejahteraan sosial.
- c) Masih lemahnya tingkat koordinasi birokrasi /lintas sektoral.
- d) Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- e) Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

2. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain :

- a) Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di bidang sosial.
- b) Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.

- c) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 33 Orang dari 135 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Tapin sebagai mitra kerja kita dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- d) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sudah dilatih dan selalu siap siaga jika ada bencana.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tapin disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagai berikut :

<i>RINGKASAN EKSEKUTIF</i>	Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2020
----------------------------	--

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tapin, stuktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKJIP.
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i>	Menguraikan tentang Perencanaan strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i>	Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
<i>BAB IV PENUTUP</i>	Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020
<i>LAMPIRAN</i>	Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2020, dan lampiran lainnya.

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINSOS TAHUN 2021

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DINSOS Tahun 2021

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan revidi secara berkala terhadap dokumen Renstra, menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran.	1. Dinas sosial telah melakukan revidi secara berkala terhadap dokumen Renstra dan telah menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2.	Meningkatkan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat.	2. Dinas sosial telah meningkatkan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat.
3.	Mempertajam informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan kerja.	3. Dinas sosial telah Mempertajam informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari disusunnya rencana strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor publik. RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tapin diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023, serta menggambarkan Tujuan dan Sasaran organisasi, serta cara pencapaiannya dalam bentuk Kebijakan dan Program. Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah visi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bersama, memiliki makna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
- b. Mewujudkan, memiliki makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- c. Maju, memiliki makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- d. Sejahtera, memiliki makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.
- e. Agamis, memiliki makna pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

2. Misi Kepala Daerah

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Adapun misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- c) Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- d) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung perwujudan misi kedua. Dalam rangka mewujudkan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa, maka Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah dapat membantu masyarakat dalam hal pelatihan dan bimbingan teknis dan bantuan sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Sosial yang adalah sebagai berikut :

3.1 Tujuan :

Menurunnya kemiskinan

3.2 Sasaran :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.
- b. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. INDIKATOR UTAMA KEGIATAN

Pada saat proses penyusunan LKJIP Tahun 2020, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan Perumusan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru yang lebih baik dan akuntabel. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri.
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Definisi operasional yg mengindikasikan PPKS yang dientaskan yaitu memperbaiki,meningkatkan keadaannya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya</p> <p><u>Kriteria Mandiri :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa mengakses pekerjaan atau memiliki usaha sendiri 2. Tidak bergantung pada bantuan 3. Mampu memberikan nilai ekonomi 4. Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari 5. Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Persentase PPKS yang Mandiri merupakan indikator yang jelas digunakan untuk menghitung besaran PPKS yang sudah mandiri, karena dengan kemandirian PPKS akan mengentaskan jumlah PPKS tersebut.</p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
			<p><u>Rumus :</u></p> $\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil</p> <p><u>Kriteria Terampil :</u> Cakap dalam menyelesaikan tugas Kesejahteraan Sosial, mampu dan cekatan dalam melayani PPKS</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil}}{\text{Jumlah SDM PSKS yang terampil}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

C. PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 untuk Eselon II, III dan IV terjadi perubahan, adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS (ESS.II)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri.	2,50 %	2,07 %
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS (ESS.III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
2.	Meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %
3.	Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
4.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
5.	Meningkatkan pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase dengan capaian kinerja > 80	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Aset Yang Tercatat dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat yang baik	100 %	100 %
2.	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi Serta Administrasi Kepegawaian SOPD	Persentase Dokumen Sarana Dan Prasarana yang baik	100 %	100 %
		Persentase Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SOPD sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN KEUANGAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gepeng) yang mendapatkan Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gepeng) yang mendapatkan Bantuan Sosial	42.91%	30,49%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA (ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	PPKS Terlantar (Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	40.45%	39,95%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS DAN KELUARGA
(ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar) yang mendapatkan Distribusi Bantuan Sosial	49.81%	4,03%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap permodalan	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	0,5%	0,5%
2.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	74,42%	88,34%
3.	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir	88,56%	46,93%
4.	Meningkatnya Kualitas Rumah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Rumah Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang layak huni	20,45%	11,45%
5.	Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100%	98,71%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KORBAN BENCANA (ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	20.45%	11,45%
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN
PENANGANAN KEMISKINAN (ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Fakir Miskin yang layak mendapatkan bantuan KUBE/UEP	Persentase Fakir Miskin yang lulus seleksi fasilitasi bantuan UEP/KUBE	0,5%	0,5%
2.	Bantuan Sosial tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan data	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial BPNT tepat sasaran sesuai dengan data	74.42%	88,34%
		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial PKH tepat sasaran sesuai dengan data	43.26%	43,22%
3.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	Persentase Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	88.56%	46,93%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terampil	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	100 %	100 %
2.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TMP	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
(ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentasi Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	45,68 %	79,53%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PEMBINAAN PANTI SOSIAL DAN KEPAPHLAWANAN (ESS. IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisian, dan kejuangan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam Kondisi Baik	100 %	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin merupakan merupakan Laporan Kinerja Tahun Ketiga dari Renstra dan RPJMD periode 2018-2023. Tetapi pada tahun ketiga ini, RENSTRA Dinas Sosial dilakukan perubahan sebagai tindak lanjut hasil asistensi untuk perbaikan IKU pada Dinas Sosial.

LKjIP 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
II	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
III	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
IV	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin

Untuk mewujudkan pencapaian visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Tapin adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Dinas Sosial Kabupaten Tapin berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin termasuk pada **“Misi Kedua”** yaitu **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”**. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning), dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai “dampak” tujuan dan sasaran, memberi petunjuk tentang hasil pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian outcome, sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi apa yang ingin diubah dari serangkaian ikhtiar (program) pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks ini, tujuan dan

sasaran menjelaskan apa yang ingin diubah dari kondisi masa kini yang kurang ideal sebagaimana tercermin dari isu-isu dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin periode 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) Indikator Sasaran, realisasi Indikator Sasaran I pada tahun ketiga RPJMD yaitu Tahun 2021 sebesar 3,60% dari target 3,55% dengan capaian 98,61%, realisasi Indikator Sasaran II sebesar 0,28 dari target 0,44 dengan capaian 157,14%, realisasi Indikator Sasaran III sebesar 0,04 dari target 0,05 dengan capaian 125,00% (Tabel 3.1). Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin Dinas Sosial terhadap Indikator Sasaran RPJMD dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- Sebanyak 2 indikator berkategori **“BAIK SEKALI” (BS)**.
- Sebanyak 1 indikator berkategori **“BAIK” (B)**.

Tabel 3.1

**Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial
Tahun 2021**

SASARAN		Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian %
URAIAN	INDIKATOR			
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,55	3,60	98,61
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,44	0,28	157,14
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,05	0,04	125,00

(Sumber Data BPS Tapin 21 Desember 2021)

Pada Tabel 3.1 terlihat realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2021, yaitu Persentase penduduk miskin (%) sebesar 3,55% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 3,60% telah tercapai 98,61%. Realisasi Sasaran Indikator II Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin) sebesar 0,28 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 0,44 dengan capaian 157,14%. Realisasi Sasaran Indikator III Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin) sebesar 0,04 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu 0,05 dengan capaian 125 %

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran dan pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2020	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	2,5	2,07	82,96
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
Rata-rata capaian IKU						91,48

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebesar 91,48% hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah “**BAIK**” (**B**) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan target kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial tahun 2021, terdapat 2(dua) sasaran strategis dan 2(dua) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- **Sebanyak 2 indikator berkategori BAIK.**

Indikator berkategori BAIK ada 2 (dua) yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dengan capaian 82,96% dan Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian sebesar 100%.

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Tercapainya Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dan Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil, disebabkan karena adanya bantuan permodalan berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas dan fakir miskin yang dananya bersumber dari APBD 1 yang diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Adapun capaian IKU Dinas Sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1

Sasaran :

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan

Pencapaian strategis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri. Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah PPKS yang Mandiri dibagi Jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%.

Pada tahun 2021 fakir miskin yang mendapat bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjumlah 37 orang, dengan sumber data DTKS BNBA jumlah Fakir miskin 1.784 rumah tangga.

Sehingga realisasi capaian kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri adalah 82,96% dengan realisasi 2,07 % dari target 2,5%, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100 \%$	$\frac{37}{1.784} \times 100\% = 2,07 \%$

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	2,5%	2,07%	82,96%

Tabel 3.5

Data Jumlah PPKS yang mendapat Bantuan KUBE dan UEP Tahun 2021

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas	
	Alat Pertanian	3
	Peternakan Ayam	19
	Kerajinan Purun Dan Jangan	4
	Usaha Gas Elpiji	1
	Warung Nasi Kuning	1
2.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin	
	Penjual Gorengan	1
	Penjual Es Keliling	1
	Jual Keripik dan	1
3.	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Anyaman Purun)	6
	Total	37

Fakir miskin yang telah dibantu melalui KUBE dan UEP diharapkan dapat mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarganya.

2

Sasaran :**Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Pencapaian strategis Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) diukur oleh indikator kinerja berupa Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS). Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil dibagi Jumlah SDM PSKS yang terampil dikali 100%.

Pada tahun 2021 PSKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS berjumlah 386 orang, sedangkan jumlah PSKS yang terampil sebanyak 386 orang.

Sehingga realisasi capaian kinerja Persentase PSKS dalam melayani PMKS adalah 100% dengan realisasi 100% dari target 100%, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	$\frac{\text{Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil}}{\text{Jumlah SDM PSKS yang terampil}} \times 100 \%$	$\frac{386}{386} \times 100 \% = 100 \%$

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.8

Data Jumlah PSKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS Tahun 2021

No.	Uraian	PSKS Keseluruhan	PSKS yang Berperan
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14	14
2.	Karang Taruna	45	45
3.	Karang Taruna (UEP)	280	280
4.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	35	35
5.	TKSK	12	12
	Jumlah	386	386

4. Capaian Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	5.132.212.825	100%	95,95%	95,95%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	10.703.000	100	100	100%
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10.703.000	13	13	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	%	2.569.141.025	100	100	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	2.562.538.025	12	12	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3.633.000	1	1	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Tahun SKPD						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2.970.000	1	1	100%	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	1.238.972.300	100	85,71	85,71%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	10.678.100	12	12	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	144.869.800	12	12	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	81.205.500	12	12	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	9.863.200	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material untuk Tapin Expo	Bulan	1.823.700	12	12	0,00%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	35.365.000	12	12	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	955.167.000	12	12	100%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	737.701.700	100	100	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	30.000.000	12	12	100%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	477.033.200	12	12	100%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	230.668.500	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	241.884.800	100	100	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12.590.000	12	12	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	85.200.000	12	12	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	144.094.800	12	12	100%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	333.810.000	100	90	90%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	117.807.200	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Buah	14.200.000	20	14	70%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Buah	201.802.800	1	1	100%
II	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	%	3.300.393.300	100%	72,50%	72,50%
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	%	3.300.393.300	100	72,50	72,50%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56.925.800	60	54	90%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	103.661.400	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Kewenangan Kabupaten/Kota						
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	3.127.456.100	7	7	100%
	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Orang	12.350.000	11	0	0,00%
III	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Terkantar (Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	%	2.963.670.900	42,91%	12,35%	28,77%	
	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	%	2.945.138.900	100%	57,54	57,54%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	1	Penyediaan permakanaan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Orang	264.922.000	500	0	0,00%
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Orang	101.047.500	150	150	100%
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	2.402.458.300	911	858	94,18%
	4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	176.711.100	500	178	36%
	B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	18.532.000	100	0	0,00%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Non SPM)	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	18.532.000	10	0	0,00%
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1.201.760.100	88,56%	59,04%	66,67%
	A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	%	1.201.760.100	100	66,67	66,67%
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Waktu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	471.120.800	12	12	100%
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	642.879.300	12	12	100%
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah sosialisasi perda	Kali	87.760.000	1	0	0,00%
V	Program Penanganan		Persentase PMKS yang Memperoleh Penanganan	%	3.919.913.500	100%	100%	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Bencana	Bencana					
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	3.861.888.000	100	100	100%
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	Orang	357.535.000	230	230	100%
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Orang	81.937.000	150	150	100%
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Rumah masyarakat miskin (RUTILAHU) yang direhab	RTLH	3.422.416.000	126	126	100%
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	%	58.025.500	100	100	100%
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah tenaga penanganan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	27.868.000	80	80	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	30.157.500	50	50	100%
VI	Program Pengelolaan Taman Makam pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	%	62.583.300	100%	100%	100%
	A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	%	62.583.300	100	100	100%
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Buah	62.583.300	1	1	100%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	-	-	82,96 %
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	-	100 %

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

SASARAN		Target Tahunan 2021	Realisasi Tahunan 2021	Persentase Capaian 2021	Realisasi Tahunan 2019	Target Tahun 2023
URAIAN	INDIKATOR					
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,55	3,60	98,61	3,06	3,35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,44	0,28	157,14	0,45	0,46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,05	0,04	125,00	0,12	0,03

Sumber data : BPS (21 Desember 2021)

E. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Standar Nasional

Standar nasional yang digunakan oleh Dinas Sosial adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Dinas Sosial selama kurun waktu tertentu. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun

		panti					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun

Berdasarkan target yang telah ditetapkan diatas, maka realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	43 Orang	42 Orang	98 %	2021	26 Bantuan Sosial Uang, 14 Paket Sandang, 3 Alat Bantu	25 Bantuan Sosial Uang, 14 Paket Sandang, 3 Alat Bantu	98 %	2021
2	Rehabilitasi	377	358	95 %	2021	377	358	95 %	2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
	Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	Orang	Orang			Bantuan Sosial Uang	Bantuan Sosial Uang		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	864 Orang	833 Orang	96 %	2021	864 Bantuan Sosial Uang	833 Bantuan Sosial Uang	96 %	2021
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	2 Orang	2 Orang	100 %	2021	2 Paket Sembako	2 Paket Sembako	100 %	2021
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	691 Orang	691 Orang	100 %	2021	691 Paket Sembako dan Paket Sandang	691 Paket Sembako dan Paket Sandang	100 %	2021

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**A. Kegiatan Penganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.703.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 6.807.400 (63,60%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.562.538.025 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.508.785.974 (97,90%) dan persentase capaian kinerja terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.633.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 3.632.400 (99,98%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.970.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.970.000 (100%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.678.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 10.000.000 (93,65%) dan persentase capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144.869.800 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 97.909.390 (67,58%) dan persentase capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.205.500 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 74.858.500 (92,18%) dan persentase capaian kinerja tersedianya bahan logistic kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.863.200 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 6.568.700 (66,60%) dan persentase capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
5. Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.823.700 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) dan persentase capaian kinerja tersedianya bahan/material di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 0%.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp. 35.365.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 19.930.000 (56,36%) dan persentase capaian kinerja tersedianya fasilitasi kunjungan tamu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 955.167.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 564.200.338 (59,07%) dan persentase capaian kinerja terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 28.750.000 (95,83%) dan persentase capaian kinerja tersedianya kendaraan dinas operasional atau

lapangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 477.033.200 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 318.238.200 (66,71%) dan persentase capaian kinerja tersedianya peralatan dan mesin lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.668.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 214.411.500 (92,95%) dan persentase capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.590.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 1.782.500 (14,16%) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa surat menyurat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.200.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 35.038.339 (41,12%) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144.094.800 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 88.800.000 (61,63%) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan umum kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.807.200 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 88.704.500 (75,30%) dan

persentase capaian kinerja tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.200.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 8.055.000 (56,73%) dan persentase capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 70%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 201.802.800 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 192.063.000 (95,17%) dan persentase capaian kinerja terpeliharanya/terehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.925.800 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 44.139.600 (77,54%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan kemampuan potensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Tapin adalah 90%.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.661.400 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 100.736.200 (97,18%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan kemampuan potensi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.127.456.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.951.309.300 (94,36%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan

kemampuan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Tapin adalah 100%.

4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.350.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah 0%.

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Penyediaan Permakanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.922.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan permakanan untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 0%.
2. Penyediaan Sandang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 101.047.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 71.341.200 (70,60%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan sandang untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 100%.
3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.402.458.300 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.115.806.100 (88,06%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 94,18%.
4. Pemberian Layanan Rujukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 176.711.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 113.280.000 (64,10%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian Layanan Rujukan adalah 36%.

B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.532.000 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 4.832.000 (26,07%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial adalah 0%.

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

A. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 471.120.800 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 170.932.500 (36,28%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pendataan Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 642.879.300 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 503.155.300 (78,27%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.760.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya sosialisai Perda adalah 0%.

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 357.535.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 156.637.000 (43,81%) dan perentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Penyediaan Sandang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.937.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 75.376.000 (91,99%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan sandang untuk korban bencana alam dan sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.422.416.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.724.260.000 (79,60%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penanganan khusus bagi kelompok rentan adalah 100%.

B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.868.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 20.443.000 (73,36%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana untuk masyarakat Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.157.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 16.957.500 (56,23%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana untuk masyarakat Kabupaten Tapin adalah 100%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.583.300 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 50.053.200 (79,98%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Tapin adalah 100%.

G. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data umum kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Tapin, dari Kepala SKPD sampai dengan Staff, serta para Pejabat Fungsional, hanya berjumlah 19 orang ASN. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia / ASN yang ada di lingkungan Dinas Sosial. Pada Analisis Jabatan, belum ada Jabatan Fungsional Umum yang memang sangat diperlukan belum terisi baik di Sekretariat maupun Bidang-bidang. Contohnya saja jabatan Pengadministrasian Kepegawaian, Analis dan Pengolah Data di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Lain-lain.

Meskipun terdapat kendala kurangnya pegawai dalam menangani banyaknya kegiatan, sebagian besar SDM di Dinas Sosial Kabupaten Tapin berusaha semaksimal mungkin untuk berkinerja menunjang dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial dengan dibantu Tenaga Kontrak yang direkrut dengan anggaran APBD.

Namun jika semua pejabat manajerial/Ess. III bekerja lebih maksimal dan ada penambahan jumlah pegawai sesuai dengan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam pengadministrasian, pengelolaan dan pengolahan data, dan analisis serta penanganan penanganan masalah-masalah sosial dapat dipenuhi, tentu akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja dan sasaran strategis lebih maksimal lagi secara keseluruhan dan berinovasi menjadi unggul secara konfrenhensif baik dalam tata kelola perkantoran, pelayanan, maupun penanganan-penanganan di lapangan yang cepat dan tanggap.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu organisasi tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Pada Dinas Sosial, ketersediaan sarana sudah memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Namun untuk Prasarana, Dinas Sosial belum memiliki Gedung Kantor sendiri.

Dinas Sosial masih meminjam Gedung milik Dinas Ketenagakerjaan untuk dijadikan sebagai Gedung Kantor. Gedung tersebut

relatif kecil, ruangan yang sempit, tidak memadai, tidak representatif, khususnya ruangan untuk bidang-bidang. Bahkan untuk pelayanan pengaduan masyarakat “SAPANTUN” Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), hanya disediakan tenda yang didirikan di depan Gedung Kantor.

Hal tersebut tentu membuat kurang nyaman dan dapat menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan yang berimbas pada pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal.

3. Anggaran

Sasaran strategis pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Sosial Tahun 2021 sebesar Rp. 16.580.533.925 dan terserap sebesar Rp. 13.390.764.641 (80,76%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.189.769.284 (19,24%).

Dari sisa anggaran tersebut, efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.809.213.584 dan sebesar Rp. 380.555.700 merupakan anggaran yang tidak terpakai karena ada kegiatan yang tidak terlaksana.

* Perhitungan Anggaran Kegiatan yang tidak terlaksana

Sub Kegiatan	Anggaran yang tidak terpakai (Rp)	Keterangan
Penyediaan Bahan/Material (Tapin Expo)	1.823.700	Tapin Expo tidak diselenggarakan karena pemberlakuan PPKM sehingga penyediaan bahan/material tidak dapat direalisasikan.
LK3	12.350.000	Karena pemberlakuan PPKM, anak-anak sekolah yang menjadi target sosialisasi, tidak masuk sekolah, hanya melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
Permakanan untuk PPKS Terlantar	264.922.000	Penganggaran sub kegiatan di APBD perubahan, sehingga pelaksanaannya di akhir tahun. Masa pelelangan menjadi sangat singkat dan tidak ada pihak ketiga yang memberikan respon dan tindak lanjut
Pemberian bimbingan NAPZA	13.700.000	Sub Kegiatan tidak sesuai dengan Program Bantuan
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	87.760.000	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
Total	380.555.700	

H. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target

Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan” didukung oleh Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian 118,70%. Keberhasilan ini tentunya dengan tersedia data PPKS untuk bahan penentuan sasaran dan kerjasama yang baik dari pelaksana di lapangan yang bekerja secara optimal. Pelaksana lapangan yang berperan dalam pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan, diantaranya TKSK, PSM, PKH, Pendamping Sosial, dan lain sebagainya, serta Instansi-instansi terkait secara langsung dalam program ini, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 keberhasilan dapat diperoleh. Selain itu juga adanya dukungan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat (Kemensos).
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Strategis “Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PSKS, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 tetap terlaksana dengan baik yang dilaksanakan secara bertahap serta menerapkan protokol kesehatan hal ini atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang tentunya hal ini berdampak positif untuk penambahan wawasan dan kapasitas terhadap PSKS yang ada di Kabupaten Tapin dalam memberikan dukungan Pelayanan Sosial di Masyarakat.

I. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2021 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Sosial Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar sebesar Rp 16.580.533.925,- dengan serapan anggaran yang dapat dilakukan mencapai 80,76%, dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 3.189.769.284

Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Tapin Tahun 2021**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.	Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 734.246.700,-	Rp. 560.249.700,-	76,30
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 159.250.000,-	Rp. 158.953.000,-	99,81
2	Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	Rp. 2.573.953.025,-	Rp. 2.513.745.974,-	97,66
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.239.084.200,-	Rp. 5.495.665.967,-	66,70
	c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.874.000.000,-	Rp. 4.662.150.000,-	95,65
	JUMLAH	Rp. 16.580.533.925,-	Rp. 13.390.764.641,-	80,76

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2021**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,132,212,825	4,271,505,741	83.23	860,707,084
	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,703,000	6,807,400	63.60	3,895,600
	X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,703,000	6,807,400	63.60	3,895,600

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
	X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,569,141,025	2,515,388,374	97.91	53,752,651
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,562,538,025	2,508,785,974	97.90	53,752,051
	X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,633,000	3,632,400	99.98	600
	X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,970,000	2,970,000	100.00	-
	X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,238,972,300	773,466,928	62.43	465,505,372
	X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,678,100	10,000,000	93.65	678,100
	X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144,869,800	97,909,390	67.58	46,960,410
	X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,205,500	74,858,500	92.18	6,347,000
	X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,863,200	6,568,700	66.60	3,294,500
	X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	1,823,700	-	0.00	1,823,700
	X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	35,365,000	19,930,000	56.36	15,435,000
	X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	955,167,000	564,200,338	59.07	390,966,662
	X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	737,701,700	561,399,700	76.10	176,302,000
	X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000	28,750,000	95.83	1,250,000
	X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	477,033,200	318,238,200	66.71	158,795,000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
	X.XX.01.1..07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230,668,500	214,411,500	92.95	16,257,000
	X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241,884,800	125,620,839	51.93	116,263,961
	X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,590,000	1,782,500	14.16	10,807,500
	X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,200,000	35,038,339	41.12	50,161,661
	X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,094,800	88,800,000	61.63	55,294,800
	X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333,810,000	288,822,500	86.52	44,987,500
	X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,807,200	88,704,500	75.30	29,102,700
	X.XX.01.1.09.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,200,000	8,055,000	56.73	6,145,000
	X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201,802,800	192,063,000	95.17	9,739,800
2	X.XX.01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,300,393,300	3,096,185,100	93.81	204,208,200
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3,300,393,300	3,096,185,100	93.81	204,208,200
	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	56,925,800	44,139,600	77.54	12,786,200

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	103,661,400	100,736,200	97.18	2,925,200
	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3,127,456,100	2,951,309,300	94.37	176,146,800
	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12,350,000	-	0.00	12,350,000
3	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,963,670,900	2,305,259,300	77.78	658,411,600
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2,945,138,900	2,300,427,300	78.11	644,711,600
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan permakanan	264,922,000	-	0.00	264,922,000
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Sandang	101,047,500	71,341,200	70.60	29,706,300
	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2,402,458,300	2,115,806,100	88.07	286,652,200
	1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	176,711,100	113,280,000	64.10	63,431,100

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	18,532,000	4,832,000	26.07	13,700,000
	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18,532,000	4,832,000	26.07	13,700,000
4	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,201,760,100	674,087,800	56.09	527,672,300
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,201,760,100	674,087,800	56.09	527,672,300
	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	471,120,800	170,932,500	36.28	300,188,300
	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	642,879,300	503,155,300	78.27	139,724,000
	1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	87,760,000	-	0.00	87,760,000
5	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,919,913,500	2,993,673,500	76.37	926,240,000
	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3,861,888,000	2,956,273,000	76.55	905,615,000
	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	357,535,000	156,637,000	43.81	200,898,000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Anggaran
	1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	81,937,000	75,376,000	91.99	6,561,000
	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3,422,416,000	2,724,260,000	79.60	698,156,000
	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	58,025,500	37,400,500	64.46	20,625,000
	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	27,868,000	20,443,000	73.36	7,425,000
	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30,157,500	16,957,500	56.23	13,200,000
6	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	62,583,300	50,053,200	79.98	12,530,100
	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	62,583,300	50,053,200	79.98	12,530,100
	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	62,583,300	50,053,200	79.98	12,530,100
		16,580,533,925	13,390,764,641	80.76	3,189,769,284

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 dari tabel di atas, terdapat sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 16.580.533.925,- dengan realisasi yang mencapai Rp. 13.390.764.641,- (80,76%).

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. Kesimpulan Capaian Kinerja

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase Capaian Kinerja lebih dari 100% atau Baik (BS) sebanyak 1 IKU,
2. Indikator Kinerja Utama dengan Persentase Capaian Kinerja Lebih dari 75% s.d. 100% atau Baik (B) sebanyak 1 IKU, dan
3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebesar 91,48 %.

B. Saran Untuk Perbaikan Kinerja

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang baik berupa menambah jumlah peserta pelatihan keterampilan yang didukung oleh tersedianya dana anggaran agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Sehingga dengan keterampilan yang telah diperoleh dapat membantu mereka memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Serta meningkatkan bantuan modal usaha berupa KUBE dan UEP bagi PPKS yang dapat membuat mereka mandiri dan tidak bergantung pada pemberian bantuan lagi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi mereka. Selain itu diharapkan juga peningkatan keterampilan PPKS dan diberdayakan serta berpartisipasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi PPKS